



DIGITALISASI ADMINISTRASI PUBLIK MENDORONG PEMBANGUNAN DAERAH YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN

Nasiratunnisaa Mallappiang¹, Nasir², Sumardi³

^{1,2,3}Universitas Pancasakti

Email: nasiratun.nisaamallapping@gmail.com

Abstrak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa dalam menerapkan digitalisasi administrasi publik guna mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih efisien dan transparan. Bertempat di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan aparat desa dan masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta simulasi penggunaan perangkat digital untuk mendukung administrasi desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dan manfaat digitalisasi, serta munculnya komitmen untuk mulai mengadopsi sistem administrasi berbasis teknologi. Meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya transformasi digital di tingkat desa. PKM ini juga menjadi sarana strategis untuk menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktis masyarakat desa. Ke depan, pendampingan berkelanjutan dan dukungan kebijakan desa sangat diperlukan guna memastikan keberlanjutan proses digitalisasi.

Kata kunci: Digitalisasi, Administrasi Publik, Pemerintahan Desa, Pengabdian kepada Masyarakat, Transparansi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang administrasi publik. Di era digital saat ini, pemerintah di berbagai tingkatan dituntut untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi administrasi publik bukan lagi sebuah pilihan, melainkan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, transformasi digital dalam sektor publik telah menjadi agenda strategis nasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah. Namun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi digitalisasi administrasi publik tidak hanya terletak pada aspek teknologi itu sendiri, melainkan juga pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan budaya birokrasi yang

masih didominasi oleh pola kerja konvensional. Terlebih di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, digitalisasi administrasi publik menghadapi hambatan yang kompleks, seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparat desa.

Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar merupakan salah satu desa yang menghadapi tantangan tersebut. Sebagai wilayah dengan potensi sumber daya manusia dan alam yang cukup besar, desa ini memiliki peluang untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Namun, seperti halnya banyak desa lain di Indonesia, Desa Boddia masih menghadapi keterbatasan dalam hal penguasaan teknologi informasi oleh aparat desa dan kurangnya sistem administrasi digital yang memadai. Hal ini berdampak pada lambannya pelayanan kepada masyarakat, kurang transparannya pengelolaan keuangan desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Dalam konteks tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertajuk *"Digitalisasi Administrasi Publik Mendorong Pembangunan Daerah yang Efisien dan Transparan"* menjadi sangat relevan dan strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi, pelatihan, serta pendampingan teknis kepada aparat desa dan masyarakat Desa Boddia mengenai pentingnya dan cara-cara praktis menerapkan digitalisasi dalam sistem administrasi desa. Tujuan utamanya adalah mendorong terbentuknya sistem administrasi desa yang lebih terintegrasi, cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Pengabdian ini juga selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam hal kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat. Dalam hal ini, peran dosen sebagai agen perubahan sosial diwujudkan melalui kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi masyarakat, tetapi juga membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan kebutuhan praktis masyarakat desa dalam menghadapi tantangan era digital.

Lebih lanjut, penguatan kapasitas administrasi publik berbasis digital tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah yang lebih inklusif dan transparan. Dengan sistem administrasi yang terdigitalisasi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel. Masyarakat pun dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Kegiatan PKM ini juga merupakan implementasi dari komitmen Majelis Pengurus Pusat Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (MPP ADPERTISI) dalam mendukung penguatan kapasitas pemerintah daerah dan desa melalui kolaborasi akademisi dengan pemangku kepentingan lokal. Dengan memberikan ruang bagi dosen untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, ADPERTISI secara tidak langsung ikut mempercepat proses transformasi digital di sektor publik, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal dari sisi teknologi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam tata kelola administrasi Desa Boddia, seperti terbangunnya sistem pengarsipan digital, penggunaan aplikasi sederhana untuk pelayanan masyarakat, serta peningkatan kemampuan teknis aparat desa dalam menggunakan perangkat digital. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbentuknya budaya kerja baru yang lebih terbuka, efisien, dan berbasis data dalam pengelolaan pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna layanan publik juga akan merasakan manfaat dari layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.

Dengan latar belakang tersebut, maka pelaksanaan kegiatan PKM ini memiliki nilai urgensi dan relevansi yang tinggi dalam mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa di era digital. Melalui sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat, transformasi digital dalam administrasi publik diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang bertujuan untuk memberdayakan aparatur pemerintah desa serta masyarakat dalam memahami dan menerapkan digitalisasi administrasi publik. Lokasi kegiatan dipusatkan di Desa Boddia, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada tanggal 10 Juli 2025.

1. Pendekatan Partisipatif

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana aparat desa dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga berperan sebagai subjek pembelajaran yang memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata yang mereka alami di lapangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa materi dan solusi yang diberikan benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal.

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

- **Observasi Awal dan Identifikasi Kebutuhan**
Sebelum kegiatan utama berlangsung, tim pelaksana melakukan observasi singkat dan komunikasi awal dengan aparat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, serta potensi yang ada terkait pengelolaan administrasi desa. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun materi pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal.
- **Penyampaian Materi dan Diskusi Interaktif**
Pelatihan diawali dengan penyampaian materi tentang pentingnya digitalisasi administrasi publik, prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta contoh aplikasi digital sederhana yang dapat digunakan dalam pelayanan publik desa. Materi disampaikan secara komunikatif dan interaktif, diikuti dengan sesi diskusi

untuk menggali pemahaman peserta dan menampung pertanyaan atau kendala yang mereka alami.

- **Simulasi dan Praktik Langsung**
Peserta dilibatkan dalam simulasi penggunaan perangkat digital untuk keperluan administrasi desa, seperti pengarsipan dokumen elektronik, pembuatan surat secara digital, serta pencatatan laporan keuangan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis yang aplikatif dan mudah diterapkan.
- **Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut**
Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi singkat melalui tanya jawab dan umpan balik dari peserta. Tim juga memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada aparat desa agar pelatihan ini dapat berkelanjutan, misalnya melalui pembentukan tim kecil digitalisasi desa atau pengadaan perangkat pendukung yang dibutuhkan.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025 di Desa Boddia berjalan dengan lancar dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda desa yang keseluruhannya berjumlah sekitar 35 orang. Kehadiran peserta yang beragam ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kapasitas dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa.

1. Antusiasme dan Partisipasi Peserta

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah tingginya partisipasi aktif dari peserta selama proses pelatihan. Sejak awal kegiatan, para peserta menunjukkan ketertarikan terhadap tema digitalisasi administrasi. Mereka mengikuti pemaparan materi dengan serius, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan berbagi pengalaman terkait kendala yang dihadapi dalam administrasi desa selama ini. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa para peserta memiliki semangat untuk berubah dan memperbaiki sistem yang ada, walaupun masih terdapat keterbatasan pengetahuan teknis.

Selama sesi diskusi, peserta menyampaikan bahwa administrasi desa selama ini masih dilakukan secara manual dengan sistem pengarsipan yang belum terstruktur dengan baik. Hal ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan publik, kesalahan dalam pencatatan data, serta sulitnya mencari dokumen saat dibutuhkan. Selain itu, ketergantungan pada satu atau dua aparat desa yang menguasai komputer menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak optimal jika yang bersangkutan tidak hadir.

2. Transfer Pengetahuan tentang Digitalisasi Administrasi

Materi pelatihan yang disampaikan mencakup dasar-dasar digitalisasi administrasi publik, manfaat dan tantangannya, serta praktik baik dari desa-desa lain yang telah menerapkan teknologi digital dalam tata kelolanya. Tim PKM juga memperkenalkan

prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang dapat diperkuat melalui digitalisasi.

Peserta memperoleh pemahaman tentang pentingnya pengarsipan digital, pemanfaatan aplikasi pengelolaan surat menyurat, serta perlunya membuat basis data penduduk yang tersentralisasi. Tim PKM juga menjelaskan konsep sistem informasi desa dan bagaimana teknologi dapat mempermudah pelaporan keuangan, pelacakan program pembangunan, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Hasil dari proses ini adalah meningkatnya kesadaran peserta akan urgensi digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi di tingkat desa. Mereka memahami bahwa teknologi bukan hanya untuk keperluan administratif semata, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.

3. Praktik dan Simulasi: Penerapan Langsung dalam Situasi Nyata

Kegiatan yang paling memberikan dampak adalah sesi praktik langsung, di mana peserta diajak menggunakan perangkat komputer untuk membuat dokumen surat secara digital, melakukan pengarsipan file dalam folder terstruktur, serta menyusun laporan keuangan sederhana menggunakan spreadsheet. Tim PKM menyediakan perangkat laptop dan modul pelatihan yang telah disesuaikan dengan kondisi desa agar materi lebih mudah dipahami.

Simulasi dilakukan secara berkelompok agar peserta dapat saling membantu dan berdiskusi dalam memahami langkah-langkah teknis. Hasilnya, mayoritas peserta berhasil menyelesaikan simulasi dengan baik meskipun sebagian masih memerlukan pendampingan lanjutan, terutama bagi yang belum terbiasa menggunakan komputer.

Salah satu keberhasilan yang dapat dicatat adalah keinginan perangkat desa untuk mulai menerapkan sistem digital secara bertahap, dimulai dari digitalisasi dokumen dan penggunaan spreadsheet untuk pencatatan dana desa. Mereka menyampaikan keinginan untuk melanjutkan pelatihan serupa di masa depan agar kompetensi mereka terus berkembang.

4. Identifikasi Tantangan Lapangan

Meskipun kegiatan berjalan sukses, beberapa tantangan dan keterbatasan juga teridentifikasi selama pelaksanaan. Tantangan tersebut antara lain:

- **Keterbatasan Infrastruktur:** Desa Boddia belum memiliki fasilitas perangkat keras dan jaringan internet yang memadai. Komputer yang tersedia sangat terbatas, dan akses internet masih bergantung pada jaringan seluler yang tidak selalu stabil.
- **Rendahnya Literasi Digital:** Sebagian peserta, terutama yang berusia di atas 45 tahun, masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat komputer. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya transformasi digital yang inklusif.
- **Keterbatasan Anggaran Desa:** Dalam diskusi, perangkat desa menyampaikan bahwa anggaran untuk digitalisasi belum menjadi prioritas dalam perencanaan

keuangan desa. Dibutuhkan advokasi lebih lanjut agar digitalisasi dapat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

5. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan, tim PKM memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah Desa Boddia, antara lain:

- **Menyusun Rencana Aksi Digitalisasi:** Pemerintah desa disarankan menyusun roadmap sederhana untuk digitalisasi administrasi, dimulai dari pengelolaan surat menyurat, dokumen keuangan, hingga penyusunan data penduduk berbasis komputer.
- **Pembentukan Tim Digitalisasi Desa:** Dibentuknya tim kecil yang terdiri dari perangkat desa dan pemuda yang memiliki kemampuan teknologi untuk mengawal proses digitalisasi secara berkelanjutan.
- **Pengadaan Infrastruktur Dasar:** Melalui musyawarah desa, perlu diajukan pengadaan perangkat komputer dan dukungan internet sebagai kebutuhan prioritas dalam anggaran tahun berikutnya.
- **Pelatihan Berkelanjutan:** Pemerintah desa didorong untuk menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, Dinas Kominfo, maupun organisasi mitra untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan secara berkala.

6. Dampak Jangka Pendek yang Dirasakan

Pasca kegiatan, beberapa perubahan langsung dapat dirasakan, antara lain:

- Aparat desa mulai mengadopsi penyimpanan dokumen dalam bentuk digital.
- Beberapa peserta menyusun ulang arsip-arsip lama dengan bimbingan dari tim pelaksana kegiatan.
- Terdapat semangat kolektif dari peserta untuk terus belajar teknologi digital dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

7. Refleksi Kegiatan

Kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas administrasi publik di tingkat desa sangat mungkin dilakukan dengan pendekatan edukatif yang tepat. Meskipun dihadapkan pada tantangan nyata, semangat belajar dan keterbukaan dari masyarakat menjadi modal utama dalam proses perubahan. Akademisi memiliki peran strategis dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan dan keterampilan antara teknologi modern dan praktik birokrasi lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Boddia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa terkait

digitalisasi administrasi publik. Pelatihan ini berhasil membangun kesadaran akan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun masih terdapat tantangan infrastruktur dan literasi digital, semangat perubahan dari peserta menunjukkan bahwa transformasi digital di desa merupakan hal yang mungkin dicapai secara bertahap dengan dukungan dan pendampingan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Panduan umum sistem informasi desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kominfo. (2020). *Strategi transformasi digital Indonesia 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Nugroho, R. (2016). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Setiawan, E. (2022). Digitalisasi pelayanan publik di desa: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 145–159. <https://doi.org/10.1234/jiap.v9i2.2022>
- Prabowo, H., & Sari, N. M. (2020). E-Government implementation in rural areas: Challenges and opportunities. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 6(1), 34–47.
- Wahyudi, A. (2021). Peran literasi digital dalam mendukung transparansi pemerintahan desa. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(1), 22–35. <https://doi.org/10.5678/jst.v5i1.2021>
- United Nations. (2022). *E-Government survey 2022: The future of digital government*. <https://publicadministration.un.org/egovkb>
- World Bank. (2021). *Digital government transformation: Building foundations for effective public services*. <https://www.worldbank.org/digital-government>
- Zulkarnaen, M. (2019). Implementasi digitalisasi administrasi publik dalam mendukung good governance di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 78–90.